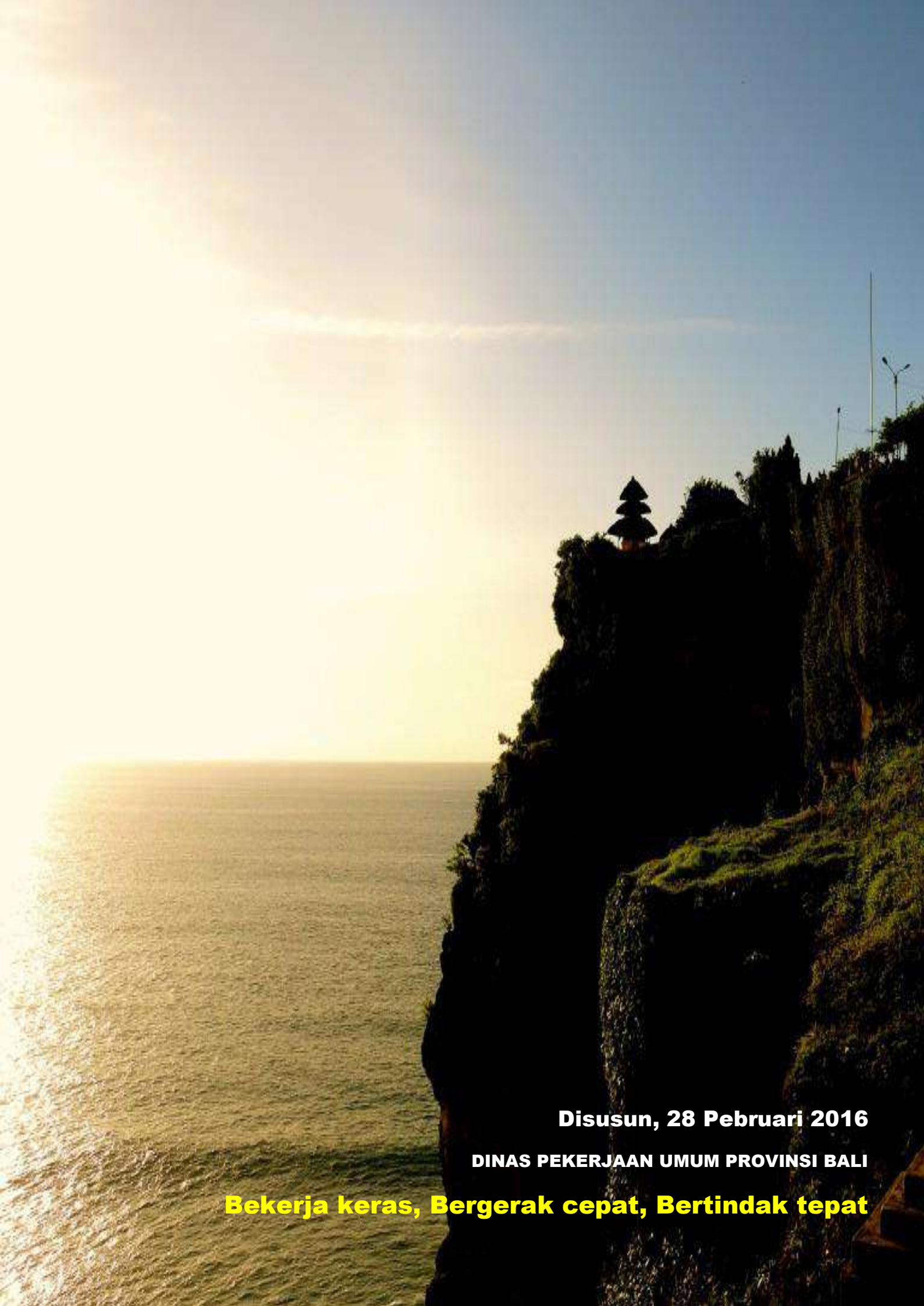


LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI BALI
TAHUN 2015



Disusun, 28 Pebruari 2016

DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI BALI

Bekerja keras, Bergerak cepat, Bertindak tepat

KATA PENGANTAR



Pujastuti Angayubagya kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2015 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Keterlibatan semua jajaran dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali sangat membantu dalam penyusunan LAKIP ini dan untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Bidang, Sekretariat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta semua staf Dinas PU Provinsi Bali yang membantu secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan tersusunnya LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2015.

LAKIP disamping sebagai Laporan Kinerja juga merupakan cerminan realisasi rencana kegiatan yang telah dijalankan pada tahun 2015. Semoga untuk tahap selanjutnya dapat diperoleh data-data dan informasi yang semakin maksimal dari Dinas PU Provinsi Bali sehingga dapat menghasilkan LAKIP yang lebih baik.

Denpasar, 22 Pebruari 2016
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Bali.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'I. Nyoman Astawa Riadi'.

Ir. I Nyoman Astawa Riadi, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600916 198012 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKTHISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I URAIAN SINGKAT ORGANISASI	
1.1. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Issu Strategis	3
1.4. Struktur Organisasi.....	4
BAB II PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Penetapan Kinerja Tahun 2015.....	1
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja	1
3.2. Analisis Capaian Kinerja	4
3.3. Realisasi Keuangan.....	28
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
Lampiran I : Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali	
Lampiran II : Penetapan Kinerja Tahun 2015	

IKTHISAR EKSEKUTIF

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali mempunyai peran yang sangat strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali, dimana Dinas PU Provinsi Bali berperan dalam bidang Infrastruktur, yang meliputi infrastruktur Jalan, sumber daya air, penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah, pengelolaan sistem penyediaan air minum, pengelolaan sistem air limbah perpipaan terpusat, TPA Regional serta energi dan sumber daya mineral.

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pekerjaan umum Tahun 2014-2018 merupakan Dokumen Perencanaan Strategi yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka pendek) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.

Visi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali adalah : “Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang handal untuk kehidupan yang produktif, berkelanjutan dan sejahtera berlandaskan konsep Tri Hita Karana menuju Bali Mandara”.

Untuk mencapai target Renstra 2014-2018, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali telah menyusun Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2015 terdiri dari 10 sasaran strategis yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Mantapnya kondisi Infrastruktur
2. Meningkatnya pengendalian abrasi
3. Meningkatnya pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi
4. Ketersediaan dan kecukupan infrastruktur.
5. Meningkatnya energi baru terbarukan
6. Meningkatnya rumah layak huni yang terjangkau
7. Meningkatnya pengendalian sumber daya pertambangan dan geologi
8. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah
9. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
10. Meningkatnya kompetensi SDM penyelenggara jasa konstruksi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala SKPD terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2015, yang telah ditetapkan di awal tahun dan juga merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Capaian indikator kinerja terhadap 10 (sepuluh) sasaran yang telah ditetapkan, menjadi tolok ukur keberhasilan dari apa yang ditetapkan di awal tahun anggaran. Capaian dari masing-masing indikator sebagian besar diatas 99%, walaupun masih terdapat beberapa capaian yang lebih kecil dari 90%, namun secara umum semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Capaian ini akan dijadikan pedoman pada apa yang akan direncanakan dan ditetapkan pada tahun anggaran berikutnya, untuk mencapai target Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali tahun 2014-2018.

Realisasi Anggaran yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bali adalah sebesar Rp. 470.620.574.421,00 dari pagu sebesar Rp. 536.943.640.120,00 atau sebesar 87,65% sehingga terjadi efisiensi sebesar 12,35 %.



BAB I

URAIAN SINGKAT ORGANISASI

1.1. DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI BALI

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali merupakan SKPD yang melaksanakan pembangunan dibidang infrastruktur. Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali memperhatikan keseimbangan berbagai aspek lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan akuntabel. Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, untuk meningkatkan harkat dan martabat serta memperkuat jati diri dan kepribadian masyarakat Bali, dalam pendekatan lokal, nasional dan global.

Sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan diterbitkannya Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka Dinas PU Provinsi Bali beserta jajarannya telah menyelesaikan penyusunan LAKIP Dinas PU Provinsi Bali periode tahun 2015 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Pembuatan LAKIP ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan anggaran, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan terhadap Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun.

LAKIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD terhadap Perjanjian Kinerja 2015, yang dilaksanakan oleh Bidang, UPT dan Sekretariat dilingkungan Dinas PU Provinsi Bali dengan mengacu pada :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah;
- Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP-135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali dan Pergub Nomor 100 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Rincian Tugas Pokok UPT di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional di bidang pekerjaan umum yang merupakan sebagian kewenangan desentralisasi Provinsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
- b. pengelolaan dan fasilitasi di bidang pekerjaan umum;
- c. pelaksanaan pelayanan umum dan pemberian rekomendasi di bidang pekerjaan umum;
- d. pembinaan pelaksana tugas sesuai dengan bidang pekerjaan umum;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha; dan
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

1.3. ISSU STRATEGIS

Beberapa Issu Strategis yang muncul pada Bidang Infrastruktur sebagai berikut:

1. Kondisi dan kapasitas infrastruktur pekerjaan umum belum memenuhi standar kebutuhan;
2. Keterbatasan akses dan kualitas layanan air minum, sanitasi dan ketenagalistrikan;
3. Penurunan kualitas lingkungan akibat perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya alam;
4. Pemanfaatan ruang kawasan strategis belum sesuai dengan peruntukkan;
5. Berkembangnya kantong-kantong permukiman kumuh;
6. Rendahnya daya saing para pelaku jasa konstruksi.

Permasalahan yang dihadapi secara umum Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali yang mempengaruhi capaian kinerjanya antara lain :

1. Pemanfaatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) khususnya SPAM Telagawaja dan Guyangan belum berjalan secara optimal yang diakibatkan oleh berbagai faktor baik yang bersifat teknis maupun non teknis serta faktor topografi;
2. Belum dapat diselesaikannya Pembangunan SPAM Penet Unit Distribusi di Kabupaten Badung.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2011, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali dibantu oleh :

1. Sekretariat Dinas PU;
2. Bidang Pengkajian dan Jasa Konstruksi;
3. Bidang Sumber Daya Air;
4. Bidang Bina Marga;
5. Bidang Cipta Karya;
6. Bidang Tata Ruang dan Perumahan;
7. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. UPT. Balai Peralatan dan Pengujian;
9. UPT. Pengelolaan Air Minum;
10. UPT. Pengelolaan Air Limbah;
11. UPT. Pengelolaan Sampah.

Secara rinci Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdapat pada **Lampiran 1**



BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan Perjanjian Kinerja adalah

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah;
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

- Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

2.1 PENETAPAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali mempunyai 18 (delapan belas) program utama yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna mencapai

target kinerja yang ditetapkan. Pada tahun anggaran berjalan, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2015 sebagai rancangan awal target kinerja kegiatan di masing-masing bidang.

Penetapan Kinerja Tahun 2015 terdiri dari 10 sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

SASARAN STRATEGIS 1	
Mantapnya kondisi Infrastruktur	
Indikator Kinerja	Target
Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	60%
Jumlah penambahan kapasitas penyediaan air baku (m3)	175.000 m3
Prosentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	84,53 %
Prosentase kehandalan bangunan gedung negara	45,00 %
Prosentase lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	64,00 %

SASARAN STRATEGIS 2	
Meningkatnya pengendalian abrasi	
Indikator Kinerja	Target
Prosentase panjang pantai yang tertangani dari ancaman abrasi	54,16 %

SASARAN STRATEGIS 3	
Meningkatnya pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi	
Indikator Kinerja	Target
Prosentase kesesuaian pelaksanaan infrastruktur dengan rencana tata ruang	100,00 %

SASARAN STRATEGIS 4	
Ketersediaan dan kecukupan infrastruktur.	
Indikator Kinerja	Target
Prosentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali	76,82 %
Prosentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali	75,00 %

Prosentase cakupan layanan pengelolaan sampah di Provinsi Bali	70,00 %
Prosentase elektrifikasi	88,60 %

SASARAN STRATEGIS 5	
Meningkatnya energi baru terbarukan	
Indikator Kinerja	Target
Jumlah kapasitas energi baru terbarukan	2,12 MW

SASARAN STRATEGIS 6	
Meningkatnya rumah layak huni yang terjangkau	
Indikator Kinerja	Target
Prosentase rumah layak huni dan terjangkau	65,00 %

SASARAN STRATEGIS 7	
Meningkatnya pengendalian sumber daya pertambangan dan geologi	
Indikator Kinerja	Target
Prosentase jumlah usaha pertambangan yang berizin	30,00 %

SASARAN STRATEGIS 8	
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	
Indikator Kinerja	Target
Prosentase jumlah izin pemanfaatan air tanah yang dilengkapi rekomendasi teknis	65,00 %

SASARAN STRATEGIS 9	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	
Indikator Kinerja	Target
Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat	100,00 %
Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah	100,00 %
Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan air minum	100,00 %
Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan pengolahan persampahan	100,00 %

SASARAN STRATEGIS 10	
Meningkatnya kompetensi SDM penyelenggara jasa konstruksi	
Indikator Kinerja	Target
Jumlah SDM penyelenggara jasa konstruksi yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat	75 orang



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas PU Provinsi Bali tahun 2015 ini didasarkan kepada evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2015.

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali tahun 2015 dilakukan dengan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali tahun 2015 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali tahun 2015 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1			
Mantapnya kondisi Infrastruktur			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	60%	61,39%	102,31
Jumlah penambahan kapasitas penyediaan air baku (m3)	175.000 m3	177.190 m3	101,25
Prosentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	84,53 %	84,24 %	99,65
Prosentase kehandalan bangunan gedung negara	45,00 %	55,55 %	123,44
Prosentase lingkungan perumahan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	64,00 %	64,20 %	100,31

SASARAN STRATEGIS 2			
Meningkatnya pengendalian abrasi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase panjang pantai yang tertangani dari ancaman abrasi	54,16 %	57,25%	105,70

SASARAN STRATEGIS 3			
Meningkatnya pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase kesesuaian pelaksanaan infrastruktur dengan rencana tata ruang	100,00 %	100,00 %	100

SASARAN STRATEGIS 4			
Ketersediaan dan kecukupan infrastruktur.			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali	76,82 %	64,93 %	84,52
Prosentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali	75,00 %	79,81 %	106,41
Prosentase cakupan layanan pengelolaan sampah di Provinsi Bali	70,00 %	57,34%	81,31
Prosentase elektrifikasi	88,60 %	89,19 %	100,66

SASARAN STRATEGIS 5			
Meningkatnya energi baru terbarukan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah kapasitas energi baru terbarukan	2,12 MV	2,125 MV	100,24

SASARAN STRATEGIS 6			
Meningkatnya rumah layak huni dan terjangkau			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase rumah layak huni dan terjangkau	65,00 %	85,61	131,70

SASARAN STRATEGIS 7			
Meningkatnya pengendalian sumber daya pertambangan dan geologi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase jumlah usaha pertambangan yang berizin	30,00 %	28,12 %	93,73

SASARAN STRATEGIS 8			
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase jumlah izin pemanfaatan air tanah yang dilengkapi rekomendasi teknis	65,00 %	74,51%	114,63

SASARAN STRATEGIS 9			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat	100,00 %	100,00 %	100,00
Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah	100,00 %	100,00 %	100,00
Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan air minum	100,00 %	85,20 %	85,20
Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan pengolahan persampahan	100,00 %	100,00 %	100,00

SASARAN STRATEGIS 10			
Meningkatnya kompetensi SDM penyelenggara jasa konstruksi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah SDM penyelenggara jasa konstruksi yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat	75 orang	77 orang	102,66

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis 1 : Mantapnya kondisi Infrastruktur

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik (%);
2. Jumlah penambahan kapasitas penyediaan air baku (m³);
3. Prosentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang);
4. Prosentase kehandalan bangunan gedung negara;
5. Prosentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU).

Analisis capaian masing-masing indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

✓ Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	60%	61,39%	102,31%

Target yang ditetapkan adalah 60%. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik adalah sebesar 61,39% dari target yang ditetapkan. Rasio Jaringan Irigasi dalam hal ini adalah panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dibagi panjang jaringan irigasi keseluruhan x 100%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, dimana Target sebesar 55% dan realisasi sebesar 56,85% sehingga capaiannya sebesar 103,36%, Dengan demikian capaian tahun 2015 lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 75,00% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 61,39% sehingga target yang harus dicapai dalam 3 tahun kedepan sebesar 13,61%.

Untuk mencapai target tahun 2015 telah dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tembuku di Kab. Bangli
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Apuan di Kab. Bangli, Gianyar
3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bekutel di Kab. Bangli, Gianyar
4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gerana Kab. Badung

5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Dwi Ekabuana di Kab. Bangli, Gianyar
Selaian pekerjaan diatas, untuk mencapai target indikator tersebut juga dilaksanakan pekerjaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun sebagai berikut :

1. Pemeliharaan rutin Jaringan Irigasi berupa perabasan, penggalian waled saluran dan pembersihan saluran.
2. Perbaikan saluran, rumah jaga, tembok pagar bendung, sayap bendung dan pintu air.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2015 adalah secara umum penutupan air tidak ditepati oleh subak sesuai dengan yang telah disepakati dalam waktu sosialisasi pelaksanaan kegiatan, karena petani sudah melakukan kegiatan tanam padi, disamping itu kondisi topografi saluran irigasi cukup ekstrim dan jarak angkut bahan yang cukup sulit. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2016 adalah perlu meningkatkan intensitas sosialisasi akan adanya pekerjaan rehab Jaringan Irigasi baik secara formal maupun tidak formal kepada petani/subak yang kena dampak pelaksanaan kegiatan.

✓ *Jumlah penambahan kapasitas penyediaan air baku (m3)*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah penambahan kapasitas penyediaan air baku (m3)	175.000 m3	177.190m3	101,25

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 175.000 m3. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian penambahan kapasitas penyediaan air baku adalah 177.190m3 atau sebesar 101,25% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, dimana Target sebesar 140.000 m3 dan realisasi sebesar 160.616 m3 sehingga capaiannya sebesar 114,72%, Dengan demikian capaian tahun 2015 lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 160.000m3 sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 177.190 m3 sehingga target Renstra telah terlampaui sebesar 17.190m3.

Dapat dijelaskan bahwa kegiatan penambahan kapasitas penyediaan air baku pada tahun 2015 ini pendanaannya bertumpu pada APBN Kementerian PUPR/ Ditjen Sumber Daya Air (Balai Wilayah Sungai Bali-Penida) sedangkan dari APBD

dianggarkan untuk pemeliharaan saja terhadap 4 (embung) yang dibangun melalui dana APBD Provinsi Bali.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2015 adalah masalah pembebasan lahan/tanah. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2016 adalah perlu koordinasi yang lebih intensif dengan kab./kota dan masyarakat sekitarnya mengenai manfaat pembangunan embung/waduk terkait dengan penambahan penyediaan air baku.

✓ *Prosentase jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	84,53 %	84,24%	99,65

Target yang ditetapkan pada indikator Prosentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang) pada tahun 2015 adalah 84,53 %.

Panjang ruas jalan Provinsi adalah 860,53 Km. Dari panjang jalan tersebut dalam kondisi baik 398,44 km, kondisi sedang 326,51 km dan kondisi rusak sepanjang 135,58 km. Apabila dibandingkan dengan kondisi di Tahun 2014, dimana Panjang ruas jalan Provinsi adalah 860,53 Km. Dari panjang jalan tersebut dalam kondisi baik 363,07 km, kondisi sedang 348,03 km dan kondisi rusak sepanjang 149,43 km.

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang) adalah sebesar 84,24 % atau sebesar 99,65 % dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2014 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 81,80 % dan realisasi sebesar 82,64 % dan capaian sebesar 101,02 %, Dengan demikian capaian tahun 2015 lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu, namun secara umum kondisi jalan semakin baik.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 89,78% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 84,24% sehingga target yang harus dicapai dalam 3 tahun kedepan sebesar 5,54%.

Untuk mencapai target yang ditetapkan tahun 2015 telah dilaksanakan kegiatan peningkatan jalan sepanjang 53,36 Km dan jembatan sepanjang 20 M' dengan uraian sebagai berikut :

1. Peningkatan Jalan Provinsi Rendang - Subagan 5,15 Km
2. Peningkatan Jalan Provinsi Denpasar – Petang dan Petang – Kintamani 7,25 Km
3. Peningkatan Jalan Provinsi Gempol – Banyuning – Penarukan 1,58 Km

4. Peningkatan Jalan Provinsi Bangli – Penelokan 6.00 Km
5. Peningkatan Jalan Provinsi Bangli – Sribatu dan Bedahulu – Sribatu 6.28 Km
6. Peningkatan Jalan Provinsi Sribatu – Penelokan 5.00 Km
7. Peningkatan Jalan Provinsi Kedewatan – Payangan – Batuanyar 4.50 Km
8. Peningkatan Jalan Provinsi Penelokan – Kubutambahan 5.30 Km
9. Pembangunan Jembatan Provinsi Tukad Lean 20 M'
10. Peningkatan Jalan Provinsi Penelokan-Kubutambahan (DAK) 8,00 Km
11. Peningkatan Jalan Provinsi Bedahulu-Sribatu (DAK) 4,30 Km

Selain pekerjaan peningkatan jalan juga dilaksanakan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan provinsi sepanjang 39,50 Km dengan uraian sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Sp. Niti Mandala – Sp. Imam Bonjol (Jl. Dewi Sartika) dan Denpasar – pesanggaran sepanjang 2,75 Km
2. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Pupuan – Pekutatan sepanjang 7,50 Km (DAK)
3. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Kerobokan – Munggu – Tanah Lot sepanjang 4,75 Km
4. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Semebaung – Bedahulu dan Teges – Bedahulu sepanjang 4,26 Km
5. Pemeliharaan Berkala Jalan provinsi Surabrata – Belatungan – Kemoning sepanjang 5,25 Km
6. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Ubud – Tegallalang – Bungbungbayung sepanjang 3,45 Km (DAK)
7. Pemeliharaan berkala jalan provinsi Jl. Cok Agung Tresna Niti Mandala (DPS) dan Jl. Prof. Moch. Yamin - Renon (DPS) (DAK) Sepanjang 2,80 Km
8. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Jl. Ngurah Rai Semarapura (DAK) Sepanjang 1,34 Km
9. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Buruan-Senganan-Pacung (DAK) Sepanjang 7,40 Km

Pada kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan provinsi juga dilaksanakan pekerjaan perkuatan tebing sebagai berikut :

1. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota, Ruas Jalan Buruan – Senganan - Pacung Km. 43+500
2. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota, Ruas Jalan Pupuan - Seririt Km. 67+700 – Km 72+950

3. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota, Ruas Jalan Penelokan-Kubutambahan Km. 103+700 dan Km. 106+150
4. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota, Ruas Jalan Antosari - Pupuan Km. 43+400 – Km. 71+100
5. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota, Ruas Jalan Teuku Umar – Batu Belig
6. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota, Ruas Jalan Petang - Batunya Km. 42+167 – Km. 43+199
7. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota, Ruas Jalan Tampaksiring - Tegallalang Km. 40+750
8. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota, Ruas Jalan Amlapura – Seraya - Culik Km. 121+550
9. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota, Ruas Jalan Penelokan - Kubutambahan Km. 77+000, Km. 79+100, Km. 89+050, Km. 98+400, Km. 104+400 dan Km. 106+150
10. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota, Ruas Jalan Klungkung - Besakih Km. 59+700, Km. 60+300
11. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota, Ruas Jalan Pakseballi - Selat Km. 48+150
12. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota, Ruas Jalan Lingkar Pesangkan Km. 65+400
13. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota, Ruas Jalan Ubud – Tegallalang - Bubungbayung
14. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota, Ruas Jalan Petang-Batunya Km. 42+100 dan Km. 43+200
15. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota, Ruas Jalan Buruan – Senganan - Pacung Km. 48+020
16. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota, Ruas Jalan Rendang - Subagan (Box Culvert Km. 63+025, Km. 68+150 dan Saluran Km. 63+700
17. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota, Ruas Jalan Klungkung - Besakih Km. 53+100.
18. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota, Ruas Jalan Wanagiri – Munduk - Mayong Km. 76+100.

19. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota, Ruas Jalan Pempatan - Besakih Km. 60+000 dan Klungkung – Besakih Km. 53+800
20. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota, Ruas Jalan Pupuan - Pekutatan Km. 76+000.
21. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota, Ruas Jalan Sidan - Bangli Km. (Jalan Merdeka)
22. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota, Ruas Jalan Denpasar – Petang Km. 12+750 (Sayap Oprit Jembatan Tukad Mambal)
23. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota, Ruas Jalan Bangli - Nongan Km. 50+800.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2015 adalah bencana alam tanah longsor pada badan jalan di ruas jalan Denpasar – Petang tepatnya berlokasi di Br. Kerta Desa Petang Kabupaten Badung yang terjadi di tahun 2014 sehingga untuk penanganan badan jalan tersebut diperlukan pergeseran badan jalan kearah timur jalan eksisting dengan pembebasan lahan kurang lebih 8,07 are. Sampai saat ini proses pembebasan lahan belum mencapai kesepakatan harga, dimana pemilik lahan menawarkan harga sebesar Rp. 250.000.000,-/are sedangkan penaksiran harga dari appraisal sebesar Rp. 85.000.000,-/are. Permasalahan lainnya adalah keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan pemeliharaan berkala maupun peningkatan ruas-ruas jalan provinsi yang berdampak pada masih terdapatnya ruas-ruas jalan provinsi yang belum bisa tertangani secara maksimal.

Upaya yang perlu dilakukan di tahun 2016 adalah melakukan perbaikan ruas jalan Denpasar – Petang dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang masih ada dan berkoordinasi secara intensif dengan pihak terkait, sehubungan adanya rencana memanfaatkan saluran irigasi sebagai badan jalan dengan membuat *box culvert* atau *U Ditch*.

✓ *Prosentase kehandalan bangunan gedung negara*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase kehandalan bangunan gedung negara	45,00 %	55,55%	123,44

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 45,00 %. Jumlah bangunan gedung negara dan lingkungan di provinsi bali sebanyak 225 unit. Sampai tahun 2015 yang dalam kondisi baik sebanyak 125 unit. Dari tabel diatas dapat dilihat Prosentase kehandalan bangunan gedung negara dan lingkungan adalah sebesar 55,55 % atau sebesar 123,44 % dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2014 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 35,00% dan realisasi sebesar 8,89% sehingga capaiannya sebesar 25,40 %, Dengan demikian capaian tahun 2015 jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 75,61% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 55,55% sehingga target yang harus dicapai dalam 3 tahun kedepan sebesar 20,06%. Untuk mencapai target Tahun 2015 telah dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan penataan bangunan dan lingkungan sebagai berikut :

1. Penataan Pura Penataran Agung Pucak Kembar Kenusut di Jumeneng Kec.Karangasem, Kab. Karangasem
2. Penataan Pura Brambang Agung Kec.Negara Kab.Jembrana.
3. Penataan Pura Pakangaya Ds.Pucak Sari Kec.Busungbiu Kab.Buleleng.
4. Penataan Pura Pucak Tinggah Ds.Angsri Kec.Baturiti Kab.Tabanan.
5. Penataan Pucak Natar Sari Ds.Apuan Kec.Baturiti Kab.Tabanan.
6. Penataan Pura Besi Kalung Ds.Babahan Kec.Penebel Kab.Tabanan.
7. Penataan Pura Batukaru Ds.Wangaya Gede Kec.Penebel Kab.Tabanan.
8. Penataan Pura Pucak Geni Ds.Seribupati Kec.Marga Kab.Tabanan.
9. Penataan Pura Kahyangan Jagat Luhur Batu Panas Kec.Penebel Kab. Tabanan.
10. Penataan Pura Pucak Bukit Kembar Ds.Pekraman Pacung Kec. Baturiti Kab. Tabanan
11. Penataan Pura Teratai Bang Kec. Baturiti Kab. Tabanan
12. Penataan Pura Pucak Bon Ds.Bilok Sidan Kec.Petang Kab.Badung.
13. Penataan Pura Pucak Manik Ds.Plaga Kec.Petang Kab.Badung.
14. Penataan Pura Kahyangan Jagat Kancing Gumi Ds.Sulangai Kec.Petang Kab.Badung.
15. Penataan Pura Pucak Mangu Ds.Plaga Kec.Petang Kab.Badung.
16. Penataan Pura Lempuyang Kec. Abang Kab. Karangasem
17. Penataan Pura Goa Lawah Kec.Dawan Kab.Klungkung
18. Rehabilitasi Monumen Bajra Sandhi Denpasar dan lingkungannya
19. Penataan Lingkungan Kantor Gubernur
20. Rehabilitasi Gedung GOR Lila Buana.

Pelaksanaan tahun 2015 tidak ada kendala yang prinsip, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2016 adalah memprioritaskan program kegiatan yang mendukung target renstra tentang kehandalan bangunan gedung negara.

✓ ***Prosentase lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)***

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	64,00 %	64,20%	100,31

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 64,00 %. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) adalah sebesar 64,20 atau sebesar 100,31% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2014 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 62,00% dan realisasi sebesar 58,00% sehingga capaiannya sebesar 93,54%, Dengan demikian capaian tahun 2015 lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 70,00% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 64,20% sehingga target yang harus dicapai dalam 3 tahun kedepan sebesar 5,80%.

Untuk mencapai target tahun 2015 telah dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan Koordinasi Pengembangan Perumahan pada Bidang Tata Ruang dan Perumahan sebagai berikut :

1. Penyusunan NSPM (Norma Standar Pedoman Manual) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
2. Penyusunan / Pemutahiran Data Base PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Provinsi Bali.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2015 adalah belum terkoordinasinya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang terkait, sehingga sinkronisasi data kebutuhan PSU belum maksimal dan Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2016 adalah pada Bidang tata ruang dan perumahan akan dilaksanakan kegiatan "Survei kesesuaian norma dan kebutuhan PSU perumahan pada kawasan

perkotaan", dengan tujuan mengakomodir kebutuhan PSU perumahan pada Pemerintah Provinsi Bali

Memperhatikan capaian masing-masing indikator dari sasaran Mantapnya Kondisi Infrastruksur yang capaiannya rata-rata telah mencapai 100,00% hal ini dapat dikatakan sebagai keberhasilan terhadap apa yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2015.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pengendalian abrasi

Analisis dari pencapaian indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

✓ *Prosentase panjang pantai yang tertangani dari ancaman abrasi (%)*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase panjang pantai yang tertangani dari ancaman abrasi (%)	54,16 %	57,25%	105,70

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 54,16 %. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari panjang pantai yang tertangani dari ancaman abrasi adalah sebesar 57,25% atau sebesar 105,70% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2014 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 53,06% dan realisasi sebesar 54,15% sehingga capaiannya sebesar 102,05%, Dengan demikian capaian tahun 2015 lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 57,46% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 57,25% sehingga target yang harus dicapai dalam 3 tahun kedepan sebesar 0,21%.

Dapat disampaikan bahwa kegiatan pengamanan pantai yang telah tertangani sampai dengan tahun 2015 sepanjang 104,031 km yang pendanaannya sebagian besar bersumber dari APBN Kementerian PUPR/ Ditjen Sumber Daya Air (Balai Wilayah Sungai Bali-Penida) sedangkan yang bersumber dari APBD s/d tahun 2015 sepanjang 2,658 km. Untuk mencapai target yang ditetapkan Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan pekerjaan pada kegiatan pengamanan pantai yaitu Pengamanan Pantai Yeh Gangga di Kab. Tabanan sepanjang 0,964 Km

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan adalah penggunaan akses/jalan masuk untuk mengangkut material milik desa adat sering dikomersilkan sehingga

upaya yang dilakukan pada tahun-tahun berikutnya adalah perlu peningkatan koordinasi secara lebih intensif dengan desa adat setempat disamping itu perlu penambahan *sharing* pendanaan dari APBD Provinsi Bali terkait penanganan pengamanan pantai, karena pantai di Bali dari segi ritual keagamaan sangat diperlukan masyarakat sebagai salah satu pelestarian nilai-nilai budaya.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis bidang Sumber Daya Air dan capaian target tahun 2015 melalui dana APBD Provinsi Bali telah dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis sumber daya air sebagai berikut :

1. Perencanaan 2 (dua) buah Embung di Kabupaten Buleleng
2. Perencanaan 2 (dua) buah Embung di Kabupaten Jembrana
3. Perencanaan Jaringan Irigasi Balian Kanan di Kab. Tabanan
4. Pengawasan Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi
5. Pengawasan Pengaman Pantai Yeh Gangga di Kab. Tabanan

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

✓ *Prosentase kesesuaian pelaksanaan infrastruktur dengan rencana tata ruang*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase kesesuaian pelaksanaan infrastruktur dengan rencana tata ruang	100,00 %	100,00%	100,00

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 100,00 %. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase kesesuaian pelaksanaan infrastruktur dengan rencana tata ruang adalah sebesar 100,00% atau sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2014 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 100,00% dan realisasi sebesar 100,00% sehingga capaiannya sebesar 100,00%, Dengan demikian capaian tahun 2015 sama dengan capaian tahun lalu.

Untuk mencapai target tahun 2015 telah dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan penyusunan rencana rinci tata ruang sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Pariwisata Sanur

2. Sinkronisasi dan Harmonisasi Rencana Tata Ruang Kawasan Pariwisata Soka
3. Sinkronisasi dan Harmonisasi Rencana Tata Ruang Kawasan Pelabuhan Gilimanuk

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2015 adalah :

- Belum tersedianya server berbasis GIS (Gis Server) yang sangat dibutuhkan untuk penyajian Database digital pemanfaatan ruang.
- Belum tersedianya data perumahan yang akurat termasuk pemetaan rumah tidak layak huni
- Kurangnya koordinasi antara kabupaten dan provinsi dalam bidang penataan ruang, sehingga terjadi ketidaksinkronan antara pengaturan ruang satu dengan lainnya.
- Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya penataan ruang, sehingga lebih mementingkan kepentingan ekonomi diatas kepentingan budaya dan lingkungan.

Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- Bekerjasama dengan Kementerian PU-PR/SKPD Dekonsentrasi Bidang Tata Ruang dalam memanfaatkan server berbasis GIS
- Bekerja sama dengan Dinas PU Kab/Kota dalam melaksanakan pemetaan rumah tidak layak huni dan untuk sementara menggunakan data perumahan yang dimiliki Kab/kota serta berkoordinasi dengan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Bali
- Meningkatkan koordinasi antara kabupaten dan provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan mengenai penataan ruang kepada masyarakat.

Sasaran Strategis 4 : Ketersediaan dan kecukupan infrastruktur

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Prosentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali
2. Prosentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali
3. Prosentase cakupan layanan pengelolaan sampah di Provinsi Bali
4. Prosentase elektrifikasi

Analisis dari pencapaian indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

✓ *Prosentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali	76,82 %	64,93 %	84,52

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 76,82 %. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali adalah sebesar 64,93 % atau sebesar 84,52 % dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2014 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 68,00 % dan realisasi sebesar 59,68% sehingga capaiannya sebesar 87,76%, Dengan demikian capaian tahun 2015 lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 90,00% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 64,93% sehingga target yang harus dicapai dalam 3 tahun kedepan sebesar 25,07%.

Untuk menunjang tercapainya target tahun 2015 tersebut melalui APBD Provinsi Bali dilaksanakan program/ kegiatan sebagai berikut :

1. Pemasangan Pipa tersier dan Sambungan Pelanggan Air Limbah perpipaan terpusat di Kab. Badung dan Kota Denpasar

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2015 adalah terbatasnya jumlah House Inlet yang tersedia sehingga pemasangan sambungan pelanggan yang dapat dilayani juga terbatas. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2016 adalah memprioritaskan pemasangan saluran tersier untuk memperbanyak House Inlet sehingga sambungan pelanggan lebih banyak bisa dilayani.

✓ *Prosentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali	75,00 %	79,81 %	106,41 %

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 75,00 %. Jumlah penduduk provinsi bali sebanyak 4.043.622 orang. Dari jumlah tersebut, berakses air minum

sebanyak 3.227.317 orang. Tingkat capaian dari indikator Prosentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali adalah sebesar 79,81 % atau sebesar 106,41 % dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2014 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 71,00% dan realisasi sebesar 60,70% sehingga capaiannya sebesar 85,49%, Dengan demikian capaian tahun 2015 lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 90,00% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 79,81% sehingga target yang harus dicapai dalam 3 tahun kedepan sebesar 10,19%.

Untuk menunjang tercapainya target tahun 2015 melalui APBD Provinsi Bali dilaksanakan program/ kegiatan sebagai berikut :

1. Pembuatan Sumur Uji di Banjar Tengah Pesinggahan Kec. Dawan Kabupaten Klungkung
2. Pembangunan SPAM Antapan Kec. Baturiti Kabupaten Tabanan
3. Pembangunan SPAM Desa Batungsel Kabupaten Tabanan
4. Pembangunan SPAM Desa Petiga Kec. Marga Kabupaten Tabanan
5. Pembuatan Sumur Uji Desa Sekaan Kintamani Bangli
6. Pengembangan SPAM di Bontihing, Kec. Kubutambahan Kab. Buleleng
7. Pengembangan SPAM di Desa Mundeh Kangin, Kec. Selemadeg Kab. Tabanan
8. Pengembangan SPAM Telagawaja di Kab. Karangasem
9. Pengembangan SPAM Guyangan di Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung.

✓ *Prosentase cakupan layanan pengelolaan sampah di Provinsi Bali*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase cakupan layanan pengelolaan sampah di Provinsi Bali	70,00 %	57,34%	81,91

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 70,00 %. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase cakupan layanan pengelolaan sampah di Provinsi Bali adalah sebesar 57,34% atau sebesar 81,91% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2014 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 60,00% dan realisasi sebesar 52,00% sehingga capaiannya sebesar 86,66%, Dengan demikian capaian tahun 2015 lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 85,00% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 57,34% sehingga target yang harus dicapai dalam 3 tahun kedepan sebesar 27,66%. Untuk mencapai target tahun 2015 telah dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan sebagai berikut :

1. Pembangunan TPST 3R Berbasis Masyarakat (Karangasem)
2. Pembangunan Hanger Alat Berat di TPA Regional Bangli
3. Pembangunan Gudang Solar di TPA Regional Sarbagita
4. Pembangunan Rumah Kompos di TPA Regional Bangli
5. Pengadaan Amroll Truck
6. Pengadaan Peralatan Pengolah Sampah
7. Pembangunan depo pengolah sampah (Buleleng)
8. Pengadaan Mesin Potong Rumput

Selain itu juga untuk mencapai target yang ditetapkan juga dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan peningkatan Fasilitas Pengelolaan Persampahan di TPA Regional sebagai berikut :

1. Pengadaan excavator dan wheel loader
2. Pengadaan dump truk
3. Pengadaan pick up dump (TPA reg sarbagita)
4. Biaya OP TPA Regional Sarbagita dan TPA Regional Bangli.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2015 adalah kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengolahan persampahan dan tingkat kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dari sumbernya (3R) masih rendah. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2016 adalah menambah sarana dan prasarana pendukung pengolahan sampah dan koordinasi secara intensif untuk mendorong pemkab/pemkot melaksanakan sosialisasi tentang 3R guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dari sumbernya.

✓ *Prosentase elektrifikasi*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase elektrifikasi	88,60 %	89,19%	100,66

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 88,60 %. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase elektrifikasi adalah sebesar 89,19 % atau sebesar 100,66 % dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan

Tahun 2014 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 80,62% dan realisasi sebesar 82,18% sehingga capaiannya sebesar 101,94%, Dengan demikian capaian tahun 2015 lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 90,60% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 89,19% sehingga target yang harus dicapai dalam 3 tahun kedepan sebesar 1,41%.

Untuk mencapai target tahun 2015 telah dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan Mengembangkan Kegiatan Ketenagalistrikan.

- Peningkatan ratio elektrifikasi selain dari dana APBD Provinsi Bali, juga oleh Kegiatan :
 - a. DAK Energi Perdesaan di Kabupaten Karangasem, Bangli, Buleleng, Klungkung
 - b. PT. PLN Persero (Distribusi Bali)

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2015 adalah masih terdapat rumah tangga yang tidak berlistrik yang berada diluar jangkauan jaringan PLN. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2016 adalah meningkatkan rumah tangga berlistrik di luar jangkauan jaringan PLN secara maksimal melalui berbagai sumber pendanaan.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya energi baru terbarukan

Analisis dari pencapaian indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

✓ *Jumlah kapasitas energi baru terbarukan*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah kapasitas energi baru terbarukan	2,12 MW	2,125 MW	100,24

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 2,12 MW. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Jumlah kapasitas energi baru terbarukan adalah sebesar 2,125 MW atau sebesar 100,24% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2014 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 2,10 MW dan realisasi sebesar 2,29 MW sehingga capaiannya sebesar 108,86%, Dengan demikian capaian tahun 2015 lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target sampai dengan tahun 2018 sebesar 10,67MW sedangkan capaian sampai

dengan tahun ini sebesar 4,415 MW sehingga target yang harus dicapai dalam 3 tahun kedepan sebesar 6,225 MW atau sebesar 58,62% dari target.

Jumlah pengadaan dan pemasangan *Solar Home System* sampai tahun 2015 di Provinsi Bali sebanyak 3.320 unit. Selain itu juga ada pembangunan PLTS Terpusat dengan kapasitas 15 KW sebanyak 6 unit dan kapasitas 1 MW sebanyak 2 unit.

Untuk mencapai target tahun 2015 telah dilaksanakan pekerjaan pada Kegiatan Mengembangkan Kegiatan Ketenagalistrikan sebagai berikut :

1. Pengadaan dan Pemasangan *Solar Home System (SHS)* di Kab. Karangasem (37 Unit)
2. Pembangunan Instalasi Biogas di Kab. Tabanan (2 Unit)
3. Pembangunan Instalasi Biogas di Kab. Karangasem (2 Unit)

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2015 adalah :

- Belum lengkapnya peraturan perundang-undangan di Daerah yang mengatur pengelolaan bidang ESDM meliputi pertambangan, air tanah, energi dan ketenagalistrikan.
- Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi teknis di Bidang Geologi, Pertambangan dan Ketenagalistrikan.

Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2016 adalah :

- Mempersiapkan Rancangan Perda dan Rancangan Pergub yang mengatur pengelolaan bidang ESDM di Daerah
- Mengusulkan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan Analisis Kebutuhan ke Badan Kepegawaian Daerah

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya rumah layak huni yang terjangkau

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu :

1. Prosentase rumah layak huni dan terjangkau

Analisis capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

✓ *Prosentase rumah layak huni dan terjangkau*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase rumah layak huni dan terjangkau	65,00 %	85,61%	131,70

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 65,00 %. Jumlah rumah di Provinsi Bali sebanyak 1.028.260 unit. Dari jumlah tersebut sampai dengan tahun 2015 yang layak huni sebanyak 880.279 unit. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase rumah layak huni dan terjangkau adalah sebesar 85,61 % atau sebesar 131,70 % dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2014 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 64,00% dan realisasi sebesar 60,00% sehingga capaiannya sebesar 93,75%, Dengan demikian capaian tahun 2015 lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu.

Untuk mencapai target tahun 2015 telah dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan seksi pengembangan kinerja perumahan sebagai berikut :

1. Penyusunan / Pemutakhiran Database Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
2. NSPM Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2015 adalah masih perlu banyak kajian komprehensif dilakukan guna memperoleh data akurat terkait penanganan di bidang perumahan (rumah layak huni, rumah layak huni yang terjangkau, kesesuaian norma perumahan dll).

Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2016 adalah :

1. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
2. Koordinasi dengan Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Bali, guna tercapainya kesamaan persepsi terkait data perumahan dan pembangunan perumahan permukiman yang berkelanjutan.
3. Mengikuti perkembangan pembangunan perumahan dari berbagai sumber pendanaan, sehingga dapat terkumpul data untuk kemudian dikompilasi.

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pengendalian sumber daya pertambangan dan geologi

Analisis capaian indikator kinerja dari sasaran ini adalah sebagai berikut :

✓ *Prosentase jumlah usaha pertambangan yang berizin*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase jumlah usaha pertambangan yang berizin	30,00 %	28,12%	93,73

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 30,00%. Jumlah usaha pertambangan di Provinsi Bali 158 buah. Jumlah usaha pertambangan yang memiliki izin 47 buah, dan yang belum memiliki izin 110 buah. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase jumlah usaha pertambangan yang berizin adalah sebesar 28,12 % atau sebesar 93,73 % dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2014 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 25,00% dan realisasi sebesar 25,00 % sehingga capaiannya sebesar 100,00%, Dengan demikian capaian tahun 2015 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 75,00% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 30,00% sehingga target yang harus dicapai dalam 3 tahun kedepan sebesar 45,00%. Untuk mencapai target tersebut telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan pengendalian kegiatan pertambangan batuan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2015 adalah terbatasnya upaya penertiban yang dilakukan dari pemerintah kabupaten dan aparat penegak hukum. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2016 adalah melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah kabupaten dan aparat penegak hukum.

Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah

Analisis dari pencapaian indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

✓ *Prosentase jumlah izin pemanfaatan air tanah yang dilengkapi rekomendasi teknis*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase jumlah izin pemanfaatan air tanah yang dilengkapi rekomendasi teknis	65,00 %	75,41 %	114,63

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 65,00%. Jumlah izin pemanfaatan air tanah di Provinsi Bali 1.229 buah. Dari jumlah tersebut telah dilengkapi rekomendasi teknis sebanyak 927 buah, sedangkan ijin pemanfaatan air tanah yang belum dilengkapi rekomendasi teknis sebanyak 302 buah. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase jumlah izin pemanfaatan air tanah yang dilengkapi rekomendasi teknis adalah sebesar 75,41 % atau sebesar 114,63 % dari

target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2014 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 60,00% dan realisasi sebesar 64,00% sehingga capaiannya sebesar 106,67%, Dengan demikian capaian tahun 2015 lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 80,00% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 75,41% sehingga target yang harus dicapai dalam 3 tahun kedepan sebesar 4,59%.

Untuk mencapai target tahun 2015 telah dilaksanakan pekerjaan pada Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Pemanfaatan Air Tanah sebagai berikut :

1. Evaluasi Sumur Pantau di Provinsi Bali
2. Pembuatan 1 Unit Sumur Pantau di Kabupaten Klungkung
3. Pengadaan Alat Ukur Kualitas Air Tanah

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2015 adalah keterbatasan personil teknis dalam bidang geologi dan pertambangan serta sarana yang kurang memadai untuk peninjauan/monitoring lapangan.

Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2016 adalah penambahan personil teknis dalam bidang geologi dan pertambangan serta pengadaan sarana transportasi yang lebih memadai untuk operasional kegiatan

Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu :

1. Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat
2. Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah
3. Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan air minum
4. Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan pengelolaan persampahan

Analisis capaian indikator kinerja dari sasaran ini adalah sebagai berikut :

✓ *Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat	100,00 %	100,00%	100,00

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 pada indikator Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat adalah 100,00%. Jumlah responden yang menggunakan layanan laboratorium pengujian dan alat berat sebanyak 71 responden. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat adalah sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2014 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 100,00% dan realisasi sebesar 100,00% sehingga capaiannya sebesar 100,00%, Dengan demikian capaian tahun 2015 sama baiknya dengan capain tahun lalu.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target tahun 2015 yaitu :

- Pada Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Tanah dan Bahan Bangunan dilaksanakan pekerjaan Pengadaan alat-alat laboratorium
- Pada kegiatan Pelaksanaan Pelayanan alat berat dilaksanakan pekerjaan Pengadaan truck selft loader

Permasalahan yang dihadapi yaitu Laboratorium pada UPT. Balai Peralatan dan Pengujian belum ter-Akreditasi sehingga tidak memiliki daya saing dan Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang laboratorium kualitas air maupun dibidang tanah dan bahan bangunan.

Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2016 adalah Mengikuti Uji Profesi secara berkala yang diselenggarakan oleh Puslitbang Kementerian PU-PR, Menyiapkan langkah-langkah administrasi menuju proses Akreditasi (KAN) dan Penyiapan Sumber Daya Manusia dibidang Laboratorium ke PU-an bekerjasama dengan Kementrian PUPR.

✓ *Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah	100,00 %	100%	100

Target yang ditetapkan tahun 2015 untuk indikator Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah adalah 100,00% Jumlah responden menggunakan pelayanan air limbah adalah sebanyak 10.565 responden dan menyatakan puas sebanyak 7.833 responden. Untuk tingkat capaian Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2014 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 100,00% dan realisasi

sebesar 100,00% sehingga capaiannya sebesar 100,00%, dengan jumlah responden sebanyak 7.833 responden. Dengan demikian capaian tahun 2015 sama baiknya dibandingkan dengan tahun lalu. Untuk tingkat kepuasan setiap tahunnya menggunakan target yang sama yaitu 100,00%, namun yg berbeda adalah jumlah responden yang digunakan.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target tersebut dapat yaitu :

- Kegiatan Operasional pengelolaan prasarana dan sarana air limbah dilaksanakan pekerjaan Survey penambahan dan peningkatan kebutuhan sambungan rumah di wilayah Denpasar, Sanur, dan Kuta
- Kegiatan Validasi data dan Penyebaran invoice dilaksanakan melalui pekerjaan Validasi data pelanggan dan penyebaran invoice di Wilayah Denpasar, Sanur dan Kuta
- Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi dilaksanakan melalui pekerjaan Sosialisasi di Wilayah Denpasar, Sanur dan Kuta

✓ *Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air minum*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan air minum	100,00 %	85,20 %	85,20

Target yang ditetapkan untuk indikator Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan air minum adalah 100,00%. Jumlah responden yang menggunakan pelayanan air minum sebanyak 3 responden yaitu PDAM Badung, Denpasar dan Gianyar dan yang menyatakan puas sebanyak 3 responden, untuk tingkat capaian Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan air minum adalah sebesar 85,20 %. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2014 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100 %, Dengan demikian capaian tahun 2015 lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target tahun 2015 yaitu :

- Kegiatan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Air Minum dilaksanakan dengan uraian pekerjaan sebagai berikut:
 1. Pengadaan Bahan Kimia
 2. Pengadaan dan Pemasangan Watermeter pada SPAM Telagasawa

3. Pembuatan Bangunan Clorinasi pada SPAM Telagawaja
 4. Pembuatan Bangunan Clorinasi pada SPAM Guyangan
- Pada kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan pekerjaan :
 1. Identifikasi sumber pencemar lingkungan hidup di Sungai Petanu
 2. Potensi dan Identifikasi pemanfaatan lumpur limbah pengolahan air minum SPAM Petanu untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2015 adalah :

- Rencana produksi air dari SPAM Penet 300 lt/dt, dimana dalam pelaksanaannya terealisasi baru 90 lt/dt, karena PDAM belum mampu menyerap seluruhnya. Untuk itu dilakukan pengurangan produksi, sehingga penggunaan bahan kimia dan listrik juga berkurang yang berdampak pada tidak tercapainya target yang direncanakan.
- Tertundanya penyelesaian Kesepakatan Bersama (KB) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) SPAM Penet, SPAM Telagawaja dan SPAM Guyangan antara Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dengan terbitnya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2016 adalah :

- Penyempurnaan Sistem Jaringan SPAM.
- Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka mereview draft MOU (KB) dan PKS SPAM Penet, SPAM Telagawaja dan SPAM Guyangan yang sudah ada.

✓ *Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan pengelolaan persampahan*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan pengelolaan persampahan	100,00 %	100,00 %	100,00

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 100,00%. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan pengelolaan persampahan adalah sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2014 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 100,00% dan realisasi sebesar 51,94% sehingga capaiannya

sebesar 51,94%, Dengan demikian capaian tahun 2015 lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Untuk mencapai target tahun 2015 telah dilaksanakan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2015 adalah kekurangan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam pengelolaan sampah, dan perlu penyempurnaan kelembagaan mengingat dilokasi yang sama terdapat 3 pengelola yaitu PT. NOI, UPT Pengelolaan Persampahan, DKP Kota Denpasar yang masih melakukan pemungutan retribusi padahal pengelolaan TPA Regional (TPA Sarbagita) merupakan kewenangan Provinsi. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2016 adalah peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan peningkatan Sumber daya Manusia yang berkompeten dalam pengelolaan sampah, dan perlu diselenggarakan Rapat Pimpinan untuk mencapai penyamaan persepsi dalam pengelolaan TPA Regional yang merupakan kewenangan provinsi.

Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya kompetensi SDM penyelenggara jasa konstruksi

Analisis dari pencapaian indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

✓ *Jumlah SDM penyelenggara jasa konstruksi yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah SDM penyelenggara jasa konstruksi yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat	75 orang	77 orang	102,66

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 75 orang. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Jumlah SDM penyelenggara jasa konstruksi yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat adalah sebanyak 77 orang atau sebesar 102,66% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2014 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 75 orang dan Realisasi sebesar 71 orang sehingga capaian sebesar 94,67%, Dengan demikian capaian tahun 2015 lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 500 orang sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar

148 orang, sehingga target yang harus dicapai dalam 3 tahun kedepan sebesar 352 orang.

Untuk mencapai target tahun 2015 telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Bimtek Pemberdayaan dan Pelatihan Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dengan jumlah peserta 24 orang.
2. Bimtek Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Tahun 2015 di Provinsi Bali dengan jumlah peserta 29 orang.
3. Bimtek Bidang Sumber Daya Air di Provinsi Bali dengan jumlah peserta 24 orang.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2015 adalah Peningkatan SDM melalui Bimtek belum menjadi prioritas Kab./Kota dan upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2016 adalah mengintensifkan komunikasi, koordinasi serta penyebarluasan informasi mengenai regulasi dan pola penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

3.2. REALISASI KEUANGAN

Realisasi anggaran dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Pagu tahun 2015 adalah sebesar Rp. 536.943.640.120,- (Lima ratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu seratus dua puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - Belanja pegawai Rp. 7.012.240.640,-
 - Belanja barang /jasa Rp. 90.535.435.780,-
 - Belanja Modal Rp. 439.395.963.700,-
2. Realisasi anggaran pada per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 470.620.574.421,00 (Empat ratus tujuh puluh milyar enam ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) atau sebesar 87,65% dari pagu anggaran, dengan perincian sebagai berikut :
 - Belanja pegawai Rp. 6.570.782.520,00
 - Belanja barang /jasa Rp. 72.963.383.001,00
 - Belanja Modal Rp. 391.086.408.900,00

Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2015

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Relisasi	
			Anggaran (Rp.)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.360.562.000,00	5.834.844.113,00	91,73
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.470.249.160,00	6.786.546.780,00	90,84
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	119.935.000,00	103.750.400,00	86,51
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	324.871.520,00	253.605.750,00	78,06
5	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	182.954.000,00	151.756.950,00	82,95
6	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	19.144.200.360,00	14.886.505.290,00	77,76
7	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	3.695.515.920,00	3.039.142.556,00	82,23
8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	48.384.973.180,00	36.928.299.394,00	76,32
9	Program Pengendalian Banjir	5.998.902.700,00	4.473.773.100,00	74,58
10	Pengembangan Perumahan dan Permukiman	254.451.000,00	188.042.700,00	73,90
11	Pendayagunaan Perencanaan Pengelolaan dan Pelaksanaan Pengawasan ke PU-an	461.275.000,00	360.625.250,00	78,18

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Relisasi	
			Anggaran (Rp.)	%
12	Program kehumasan Ke-PU-an	296.010.000,00	284.347.216,00	96,06
13	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3.262.427.420,00	3.031.973.401,00	92,93
14	Pengembangan Jasa Konstruksi	449.655.000,00	338.509.700,00	75,28
15	Program Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya	5.797.704.520,00	4.844.488.580,00	83,56
16	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	11.225.150.080,00	8.941.662.901,00	79,66
17	Program Penataan Bangunan	15.580.678.000,00	13.299.391.150,00	85,36
18	Program Perencanaan Tata Ruang	1.161.565.940,00	967.818.700,00	83,32
19	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	139.692.421.530,00	133.339.760.545,00	95,45
20	Program Pengembangan Jalan dan Jembatan	5.755.401.290,00	5.266.449.850,00	91,50
21	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	162.318.269.630,00	152.705.609.300,00	94,08
22	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Umum	182.964.770,00	170.225.430,00	93,04
23	Program Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam	594.672.500,00	560.647.850,00	94,28
24	Program Pengelolaan dan Pengembangan Bidang Pertambangan Umum	358.994.800,00	329.487.900,00	91,78
25	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ketenagalistrikan, Usaha Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	560.869.700,00	535.853.600,00	95,54
	Total	536.943.640.120,00	470.620.574.421,00	87,65

Adapun penjelasan dari tabel diatas adalah sebagai berikut :

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali di tahun 2015 melaksanakan sebanyak 25 program yang terdiri dari 109 kegiatan. Pagu anggaran pada tahun ini adalah sebesar Rp. 536.943.640.120,- dimana realisasi anggarannya sebesar Rp. 470.620.574.421,00 atau sebesar 87,65%

Anggaran dan Realisasi pada masing-masing bidang
Dinas Pekerjaan Umum Prov. Bali 2015

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
I.	Sekretariat	6.260.522.480,00	5.512.849.424,00	88,06
II.	Bidang Pengkajian dan jasa Konstruksi	1.368.755.520,00	1.055.047.650,00	77,08
III.	Bidang Sumber Daya Air	28.838.618.980,00	22.399.720.946,00	77,67
IV.	Bidang Bina Marga	307.766.092.450,00	291.311.819.695,00	94,65
V.	Bidang Cipta Karya	144.859.903.520,00	112.652.290.880,00	77,77
VI.	Bidang Tata Ruang	1.976.287.040,00	1.565.220.865,00	79,20
VII.	Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	1.697.501.770,00	1.596.214.780,00	94,03
VIII.	UPT. Balai Peralatan dan Pengujian	4.022.084.380,00	3.746.661.391,00	93,15
IX.	UPT. Pengelolaan Air Minum	17.936.030.940,00	11.227.349.827,00	62,60
X.	UPT. Pengelolaan Air Limbah	9.865.804.540,00	9.624.998.376,00	97,56
XI.	UPT. Pengelolaan Sampah	12.352.038.500,00	9.928.400.587,00	80,38
	Jumlah total	536.943.640.120,00	470.620.574.421,00	87,65

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2015
Dinas Pekerjaan Umum Prov. Bali

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A	Pendapatan			
	1. Pendapatan Asli Daerah	8.740.502.400,00	10.931.555.500,00	118,63
	Total Pendapatan	8.740.502.400,00	10.931.555.500,00	118,63
B	Belanja			
	1. Belanja Tidak Langsung	40.012.527.722,00	36.634.601.555,00	91,56
	2. Belanja Langsung :	536.943.640.120,00	470.620.574.421,00	87,65
	a. Belanja Pegawai	7.012.240.640,00	6.570.782.520,00	93,70
	b. Belanja Barang dan Jasa	90.535.435.780,00	72.963.383.001,00	80,59
	c. Belanja Modal	439.395.963.700,00	391.086.408.900,00	89,01
	Total Belanja	576.956.167.842,00	507.255.175.976,00	87,92
	Surplus/Defisit	568.215.665.442,00	496.323.620.476,00	87,35

Adapun penjelasan dari tabel diatas adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan
 - Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 10.931.555.500,00 yang merupakan pendapatan yang berasal dari hasil retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jika dibandingkan dengan jumlah pendapatan Asli Daerah tahun 2014 sebesar Rp.6.046.839.824,00 pendapatan tahun 2015 lebih besar dari pendapatan tahun sebelumnya.

2. Realisasi Belanja

▪ Belanja Tidak Langsung

Pagu anggaran untuk Belanja Tidak Langsung Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali adalah sebesar Rp. 40.012.527.722,00 dimana realisasi per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 36.634.601.555,00 atau sebesar 91,56% dari pagu anggaran. Apabila dibandingkan dengan tahun 2014 yang realisasinya sebesar Rp. 35.212.937.747,00 atau sebesar 86,72%.

▪ Belanja Langsung

Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal. Pada tahun 2015 pagu anggaran adalah sebesar Rp. 536.943.640.120,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp.470.620.574.421,00 atau sebesar 87,65% dari pagu anggaran. Apabila dibandingkan dengan tahun 2014 realisasi tahun 2015 lebih tinggi dari realisasi tahun 2014 dimana realisasinya sebesar Rp. 312.968.678.374,97 atau sebesar 84,83%.

Beberapa faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

- Terdapat efisiensi berupa dana sisa lelang dari paket pekerjaan yang dikontrakkan.
- Sisa anggaran pada Pembangunan Rumah Sakit Indra yang tidak berjalan sesuai dengan rencana.
- Adanya sisa untuk pembayaran listrik dan bahan kimia pada Kegiatan Operasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Minum.



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas PU Provinsi Bali tahun 2015 adalah bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD terhadap Perjanjian Kinerja 2015 yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran dan sekaligus merupakan media akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan pada lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali.

Capaian indikator kinerja terhadap 10 (sepuluh) sasaran yang telah ditetapkan, menjadi tolok ukur keberhasilan dari apa yang ditetapkan di awal tahun anggaran. Capaian dari masing-masing indikator sebagian besar diatas 99%, walaupun masih terdapat beberapa capaian yang lebih kecil dari 90%, namun semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Capaian ini akan dijadikan pedoman pada apa yang akan direncanakan dan ditetapkan pada tahun anggaran berikutnya, untuk mencapai target Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali tahun 2014-2018.

Realisasi Anggaran yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bali, pagu sebesar Rp. 536.943.640.120,00 dan terealisasi sebesar Rp. 470.620.574.421,00 atau sebesar 87,65% sehingga terjadi efisiensi sebesar 12,35 %.

LAKIP tahun 2015 selain menyampaikan capaian pada tahun berjalan, juga membandingkan capaian indikator kinerja dengan tahun sebelumnya dan termasuk juga perbandingan serapan anggarannya.

Untuk meningkatkan pencapaian kinerja kegiatan, maka hal-hal yang perlu diupayakan untuk tahun mendatang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Masih perlu ditingkatkan koordinasi dan komunikasi tentang perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan dengan pihak terkait, baik dengan pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Pusat maupun dengan apraiser agar pencapaian sasaran bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

2. Meningkatkan intensitas forum diskusi antar bidang untuk lebih memahami tugas pokok dan fungsi, meningkatkan sinergitas program kegiatan antar sector, peningkatan kualitas SDM, serta penyamaan mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan maupun evaluasi pelaksanaan fisik serta realisasi keuangan.
3. Penyusunan OE (Owner Estimate) yang lebih cermat, memperhatikan kondisi lingkungan dimana kegiatan akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur-unsur efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
4. Dalam merumuskan rencana anggaran perlu memperhatikan program/ kegiatan prioritas, terutama yang telah tertuang dalam Indikator Kinerja Utama sehingga menjadi tolak ukur teknis pencapaian keberhasilan kegiatan pada tahun mendatang.



LAMPIRAN I

STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali

Tahun 2015



LAMPIRAN II

PENETAPAN KINERJA

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali

Tahun 2015

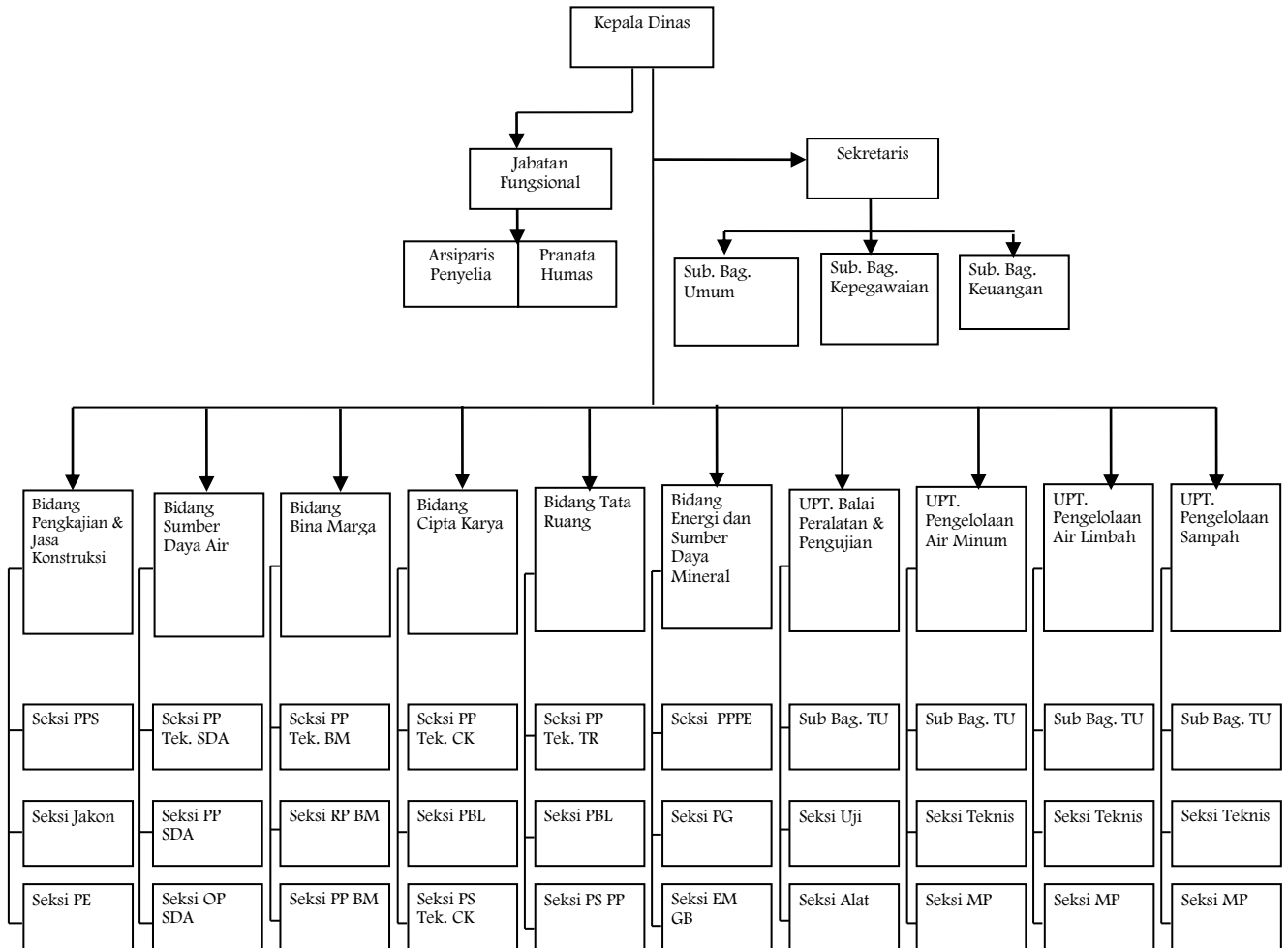


Diagram 1.1.

Struktur Organisasi Tahun 2015

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas PU Provinsi Bali